

Bab IV

Praxis Ekonomi Pancasila

Dalam sejarah pembangunan Ekonomi Pancasila sepanjang berdirinya republik ini, praktek-prakteknya sangat jelas dalam usaha pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Dalam hal ini ekonomi Pancasila telah pula membuat tata kelola dan peran masing-masing tiga pelaku ekonomi [Koperasi-BUMN-Swasta] dalam melaksanakan amanat UUD-45.

Dalam perkembangan globalisasi seperti kita saksikan saat ini ternyata tidak makin mudah menyajikan pemahaman tentang adanya sistem ekonomi Indonesia. Kaum akademisi Indonesia terkesan makin mengagumi globalisasi yang membawa perangai “kemenangan” sistem kapitalisme Barat. Sikap kaum akademisi semacam ini ternyata membawa pengaruh besar terhadap sikap kaum elit politik muda Indonesia, yang mudah menjadi ambivalen terhadap sistem ekonomi Indonesia dan ideologi kerakyatan yang melandasinya.²⁶

Sedangkan di level UU kita dapat lacak mulai dari UU Koperasi No. 25/92, UU Perusahaan Negara/1968, UU Bentuk Usaha Negara/BUMN/1968, UU Perseroan Terbatas/1969 dll. Sedangkan di level Peraturan Pemerintah yang menjadi landasan hukum bagi tegaknya pelaksanaan ekonomi Pancasila antara lain; Inpres No. 2/1985 tentang Persusuan Nasional, KepMen Pertanian No. 105/KPTS/TN.320/2/1985 tentang pengembangan persusuan nasional, Instruksi Mendagri No. 36/1985 tentang pembinaan petani ternak perah.²⁷

Agar kemiskinan dapat segera diatasi dan kemandirian bangsa segera tercapai, kita memerlukan revitalisasi sistem ekonomi Pancasila. Tetapi bagaimanakah caranya? Ada banyak pilihan, tetapi yang mendesak dilakukan adalah, *pertama*, membuat undang-undang sistem perekonomian nasional dan garis-garis besar arah strategi pembangunan jangka panjang yang penerapannya disesuaikan dengan keadaan ekonomi saat ini dan mendatang sesuai perintah UUD-45 dengan menampung lebih tegas dan jelas semua ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila. *Kedua*, menyempurnakan UU anti monopoli dan persaingan tidak sehat menjadi UU kemitraan nasional terutama dengan melakukan penajaman tata peran dan tata kelola pelaku ekonomi [BUMN-Koperasi-Swasta] dan menjadikan kemitraan sebagai

²⁶Sri-Edi Swasono, *Sistem Ekonomi Indonesia*, Makalah Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat, Sistem Ekonomi Indonesia, Jakarta, 19 Februari 2002.

²⁷Dalam penelitian Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi UI, ada 18 Peraturan Pemerintah selama sepuluh tahun sejak 1979-1989 yang menjabarkan Ekonomi Pancasila. Lihat, *Studi Kasus Manajemen KUD Setia Kawan*, LPM-UI, Jakarta, 1990, hal. 120-123

gerakan nasional. *Ketiga*, membangun *resource-base industry* yang berdaya saing tinggi sebagai prioritas utama.

Keempat, pemberdayaan Koperasi agar berperan utama dalam ekonomi rakyat. *Kelima*, memperkuat BUMN yang menguasai hajat hidup orang banyak dan strategis agar berdaya saing tinggi dan menjadi lokomotif ekonomi rakyat. *Keenam*, melakukan gerakan cinta produksi dalam negeri. *Ketujuh*, melaksanakan gerakan produktifitas dan efisiensi nasional. *Kedelapan*, menyegerakan reformasi birokrasi guna mewujudkan pemerintahan bersih dan berwibawa.

- **Pembangunan Triple Strategy**

Pendekatan yang paling realistis dalam pembangunan kita adalah campuran; antara pasar dan campurtangan pemerintah. Dalam hal ini kebijakan pemerintah yang paling mendesak adalah; 1). Pro pertanian, kehutanan dan kelautan. 2). Pro poor [kaum miskin]. 3). Pro pertumbuhan dan pemerataan. 4). Pro stabilitas. 5). Antisipasi jumlah penduduk. Kebijakan-kebijakan harus menjadi ikhtiar untuk *empowering* atau pemberdayaan potensi ekonomi dalam negeri dan sejalan dengan cita-cita kita bersama agar bangsa ini menjadi bangsa yang unggul.

Keputusan pemerintah untuk mengalokasikan belanja modal BUMN kepada industri dalam negeri misalnya, langsung maupun tak langsung akan menggerakkan sektor riil dan jasa termasuk untuk menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja.

Ada sekitar 600 perusahaan dalam negeri yang bisa mengajukan penawaran produk barang dan jasanya bagi pembangunan proyek baru kepada BUMN. Beberapa produksi industri strategis nasional yang sudah dikenal di luar negeri antara lain PT PAL, PT Dirgantara Indonesia, PT Krakatau Steel, dan lainnya. Indonesia juga memiliki industri kimia, komponen alat berat, mesin, kelistrikan, dan pengeboran yang kualitas produknya tak kalah dengan produk asing. Jika kelak semua atau sebagian besar industri dalam negeri menjadi pemasok kebutuhan belanja dari 258 BUMN, hal itu akan menjadi catatan sejarah dalam perekonomian Indonesia.

Pembelian kembali Indosat dari STT juga merupakan keputusan yang tepat, mengingat peran sektor telekomunikasi yang sangat strategis bagi negara dan bangsa. Telekomunikasi adalah salah satu sektor ekonomi yang menguasai hajat orang banyak dan karena itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ketika menjadi anggota MPR (1999-2004) penulis termasuk sebagai salah seorang yang mengusulkan dan merumuskan ketetapan MPR agar Indosat dibeli kembali.

Tentu akan ada biaya yang jauh lebih besar yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dibanding pada saat menjual Indosat pada 2003 lalu. Namun akan lebih baik rugi di awal ketimbang menyesal di belakang hari. Apalagi Indosat mampu memberikan penghasilan yang sama besarnya dengan hasil penjualan saham kepada STT mengingat perolehan laba yang rata-rata mencapai Rp 1,5 triliun per tahun.

Stop Impor Beras

Pernyataan Presiden SBY untuk melarang impor beras juga akan menjadi kabar segar terutama bagi petani yang selama ini terpuruk akibat membanjirnya beras impor di dalam negeri. Keputusan Presiden SBY disayangkan hanya berlaku sampai 5 Januari 2006. Setelah tanggal itu, keputusan larangan impor tadi akan ditinjau kembali dan bukan tidak mungkin pemerintah akan kembali membuka keran impor beras.

Padahal keputusan larangan impor itu, harus menjadi ketetapan yang sepenuhnya menghentikan impor beras sama sekali karena merugikan petani padi dan mengurangi kemandirian bangsa. Memang dapat dipahami bahwa pemerintah memang harus terus menjaga tingkat inflasi agar tetap terkendali apalagi akhir-akhir ini ada indikasi harga beras mulai naik. Namun sesungguhnya banyak upaya lain untuk menjaga harga tidak naik. Salah satunya adalah dengan menggerakkan masyarakat melakukan diversifikasi pangan.

Langkah strategis yang merupakan pendekatan dari aspek permintaan ini belum banyak dilakukan oleh Pemerintah. Data BPS paling akhir mengungkapkan ada defisit produksi beras di tahun 2005 sebesar 50 ribu ton. Apabila pemerintah dapat menggerakkan 2 juta masyarakat saja untuk mengurangi konsumsi beras sekali dalam sehari misalnya, maka apabila rata-rata konsumsi beras setiap orang adalah 100 kg per tahun maka akan terjadi pengurangan permintaan sebesar 30 kg kali 2 juta atau 60 ribu ton. Artinya kita tidak perlu impor. Apakah langkah ini sulit dilaksanakan dalam jangka pendek? Sesungguhnya tidak.

Saya yakin kalau gerakan ini dipelopori langsung oleh Presiden dan diikuti seluruh pimpinan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, upaya tersebut dalam waktu singkat akan berhasil. Dan apabila gerakan ini menjadi gerakan nasional maka dalam jangka panjang keberhasilan kita dalam swasembada pangan akan berlanjut dan bukan mustahil kita menjadi pengeksportir utama pangan di Asia Pasifik. Pemikiran tersebut sudah sering saya kemukakan dalam tulisan dan berbagai pertemuan terutama sejak setahun lalu. Apabila

langkah strategis ini dilakukan setahun yang lalu saja mungkin kita tidak usah ribut soal impor beras.

Dulu di masa pemerintahan yang lalu, Indonesia sebenarnya pernah mencapai masa kejayaan di bidang pertanian khususnya produksi beras. Negara kita bahkan mampu memenuhi kebutuhan konsumsi beras dalam negeri dan negara yang berswasembada pangan, lalu mendapat penghargaan dari FAO pada 1984. Kejayaan terulang pada tahun 2004 ketika produksi beras nasional mencapai 54,09 juta ton gabah kering giling atau setara 33 juta ton beras, dan menjadi produksi beras tertinggi sepanjang umur republik ini.

Selain menguntungkan secara ekonomi, swasembada beras memenuhi tuntutan sosial dan politik bernegara yaitu kebanggaan sebagai bangsa yang mandiri untuk memenuhi kebutuhan pangan. Bayangkanlah jika biaya untuk impor beras dialokasikan untuk pemberdayaan petani niscaya bukan hanya swasembada yang bisa dicapai namun kita bisa menjadi negara pengekspor beras. Jika kemudian swasembada beras diikuti juga dengan swasembada di bidang lain maka kemandirian sebagai sebuah bangsa akan semakin kuat menyongsong perdagangan bebas.

Akhirnya yang Kita Butuhkan adalah Keteladanan

Tentu tak mudah menuju apalagi mencapai kemandirian sebagai bangsa di tengah serbuan globalisasi. Tapi tidak berarti tidak ada jalan keluar. Bila menyimak pernyataan Presiden SBY yang mengharapkan bangsa ini bisa menjadi bangsa yang unggul di semua bidang, Indonesia mestinya mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan konsumsi dalam negerinya.

Salah satu jalan keluarnya harus ada contoh atau teladan dari pucuk pimpinan negara. Rakyat perlu disadarkan dan didorong untuk mencintai produksi dalam negeri. Jika para pemimpin negara memberi contoh penggunaan industri dalam negeri, niscaya tak akan sulit bagi rakyat untuk mengikuti. Dengan jumlah penduduk kelima terbesar di dunia, Indonesia sebenarnya adalah aset pasar yang besar dan potensial. Akan sangat disayangkan jika para pemimpin negaranya tak menggerakkan kecintaan pemakaian produk bangsa sendiri dan harus terus banyak bergantung dengan barang-barang negara lain.

Karena itu sudah saatnya, presiden, wakil presiden, para menteri, anggota DPR dan komponen bangsa yang lain mulai serius mengampanyekan penggunaan sepatu, baju, dan barang produksi dalam negeri lainnya— dan benar-benar menggunakannya. Rakyat Jepang misalnya, tidak mau mengonsumsi daging sapi impor dengan dalaih adanya penyakit sapi gila. Penduduk Kuba yang diembargo puluhan tahun oleh Amerika Serikat, saat ini tetap mampu eksis justru

karena penggunaan produk dalam negerinya yang dicontohkan Fidel C. Castro, Presiden Kuba.

Untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri, para pengelola negara juga harus mulai menggerakkan diversifikasi pangan. Negara kita sangat kaya akan hasil-hasil pertanian pengganti beras sebagai kebutuhan pangan pokok. Singkong, ubi, sagu dan jagung adalah beberapa komoditi yang sebenarnya bisa mengganti beras. Kalau perlu presiden bisa menginstruksikan untuk tidak mengonsumsi nasi pada jam makan tertentu misalnya. Jika hal itu bisa dilaksanakan setiap hari selama 5 tahun, misalnya, maka jutaan ton beras akan tersedia sebagai cadangan nasional dan negara kita tak perlu repot mengimpor beras.

Namun sekali lagi semua itu membutuhkan keteladanan nasional. Kita tidak menafikan apalagi anti globalisasi karena hal itu sudah menjadi keniscayaan. Bangsa ini justru perlu "tenaga pendorong" agar berdaya dan sanggup mandiri menghadapi persaingan pasar bebas. Apa yang dikatakan Evo Morales, Presiden Bolivia terpilih yang akan memotong separuh gajinya untuk kepentingan nasional negaranya barangkali bisa menjadi contoh, bahwa keteladanan sebuah bangsa memang semestinya dimulai dari atas, dari pemimpin negara.

Ternyata dalam mengatasi persoalan utama bangsa pada awal Orde Baru seperti kelangkaan pangan, pengangguran dan kemiskinan, pemerintah Orde Baru melalui GBHN sebagai pelaksanaan sistem Ekonomi Pancasila telah menetapkan pembangunan sektor pertanian pangan, terutama beras sebagai prioritas pembangunan. Pembangunan sektor pangan ini disebut juga program revolusi hijau. Mengapa komoditi beras menjadi diutamakan? 1). Karena sebagian besar rakyat miskin bekerja di sektor pertanian, khususnya beras. 2). Beras adalah hajat hidup sebagian besar masyarakat. 3). Harga beras saat itu tidak stabil dan tinggi karena kelangkaan suplai dalam negeri akibat produksi yang sangat rendah. Oleh karena itu dibuatlah satu program peningkatan produksi agar tercapai swasembada beras, kestabilan harga, dan pada gilirannya peningkatan dan pendapatan kesejahteraan petani.

Dalam program tersebut tetap digunakan mekanisme pasar untuk menetapkan harga beras yang stabil yang dapat memberikan insentif untuk peningkatan produksi di satu pihak, di lain pihak harga tersebut tetap terjangkau oleh daya beli sebagian besar konsumen rakyat banyak. Untuk menangani pemasaran beras, pemerintah menugaskan Bulog agar menjaga stabilitas harga dengan mendapatkan fasilitas kredit lunak dari Bank Indonesia dan kewenangan monopoli impor beras.

Dalam prakteknya, Bulog dalam menjaga kestabilan harga, ia hanya menguasai stok nasional sebesar 10% dari produksi beras. Stok nasional itu dipenuhi dari pengadaan dalam negeri dengan pembelian dari koperasi dan swasta dengan harga dasar yang ditetapkan pemerintah. Sebaliknya, pada waktu harga tinggi, Bulog melakukan operasi pasar melalui koperasi dan swasta agar harga tetap terjangkau oleh daya beli rakyat banyak. Apabila untuk operasi pasar, stok nasional tidak mencukupi, Bulog diberi kewenangan tunggal untuk mengimpor beras.

Untuk mengatasi problem sebagian besar petani yang memiliki aset-aset produksi seperti modal, teknologi dan tanah yang sangat terbatas, para petani dihimpun dalam Koperasi agar kegiatannya lebih produktif dan efisien. Di samping itu, pemerintah melalui perusahaan-perusahaan negara dan melalui Koperasi langsung memfasilitasi para petani dengan bermacam subsidi, pembebasan pajak, penyediaan prasarana dan sarana produksi, serta pemasarannya.

Untuk bibit lewat PT SahYang Sri, pupuk lewat PT Pusri, Pupuk Kaltim dll, obat-obatan lewat PT Pertani, modal lewat BRI, dan pemasaran oleh Bulog. Sedangkan pembangunan irigasi, jalan dan prasarana dan sarana lainnya dilakukan langsung oleh pemerintah. Untuk maksud tersebut, pemerintah melakukan investasi besar-besaran dalam mendirikan pabrik pupuk, pembuatan irigasi dan pembuatan jalan-jalan di pedesaan dengan bantuan utang luar negeri yang lunak.

Dari pelaksanaan program di atas, jelaslah bahwa mekanisme pasar tetap digunakan oleh tiga pelaku ekonomi melalui kemitraan yang setara dengan dikendalikan oleh peran Bulog sebagai stabilisator harga beras. Petani beserta koperasi dapat ikut aktif berpartisipasi dan besar perannya dalam proses pasar tersebut karena mendapat input besar-besaran dari pemerintah. Hasilnya, terjadi peningkatan produksi sebesar lebih dari 50% yaitu pada tahun 1970 produksi beras baru mencapai 13,1 juta ton menjadi sebesar 20,2 juta ton pada tahun 1980.²⁸ Pada tahun 1984, program ini berhasil menjadikan Indonesia dari negara pengimpor beras terbesar menjadi negara yang swasembada beras. Program ini mendapat pengakuan dari FAO. Suatu prestasi bangsa yang sangat membanggakan.

Dalam kegiatan perekonomian lainnya untuk mengatasi kelangkaan pangan dan kemiskinan, dijumpai juga implementasi sistem Ekonomi Pancasila, yaitu program peningkatan produksi susu sapi untuk mengurangi impor susu yang sangat besar sekali.

²⁸Soeharto, *Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia 1981*, Departemen Penerangan RI, 1981.

Walaupun agak berbeda dengan kasus beras karena pasar susu sapi sangat terbatas, terutama pada industri pengolahan susu. Dalam pasar susu ini, penentuan harga dalam perdagangan susu sapi lebih banyak ditetapkan oleh rasio susu impor dan susu lokal. Di samping itu didasarkan melalui konsensus dalam kemitraan antara koperasi susu dengan perusahaan industri pengolahan susu tersebut. Untuk kepastian pelaksanaannya maka konsensus tentang harga tersebut diatur melalui Menteri Perdagangan.

Program ini merupakan revolusi putih di pedesaan yang berhasil meningkatkan jumlah kepemilikan sapi oleh peternak pada tahun 1979, dari 6.780 peternak memiliki 38.185 ekor menjadi 74.000 peternak yang memiliki 250.000 ekor tahun 1989. Mereka menghasilkan produksi susu tahun 1979 sebesar 10.3 juta liter menjadi 250 juta liter pada tahun 1989. Harga susu di peternak dari Rp.180 pada tahun 1979 menjadi Rp. 400 tahun 1989. Rasio susu dalam negeri dibanding impor pada 1979 sebesar 1:10 menjadi 1,1:07 di tahun 1989. Penghematan devisa \$2,3 juta pada tahun 1979 menjadi \$150 juta pada tahun 1989.²⁹

Berbagai program seperti tersebut di atas telah berhasil mengurangi jumlah kemiskinan dan menyejahterakan rakyat. Hal ini dapat dilihat pada keberhasilan mengurangi kemiskinan dari 54,2 juta jiwa (1976) atau 40,1% turun menjadi 22,5 juta jiwa atau 11,3% pada tahun 1996. Artinya 31,7 juta jiwa menjadi lebih sejahtera.³⁰

- **Kampanye Kewirausahaan Bagi Kemakmuran Bangsa**

Dunia memasuki persaingan antarbangsa yang semakin ketat, dengan dimensi utamanya di bidang ekonomi. Dalam kondisi yang demikian, walaupun kita bergembira dengan perkembangan ekonomi makro antara 2000 hingga awal 2005 yang membaik (seperti pertumbuhan ekonomi 3-5%/tahun, ratio utang pemerintah/PDB menurun, inflasi moderat di bawah 10%/tahun, dan peringkat Indonesia menjadi B-), namun kinerja ekonomi Indonesia khususnya di sektor riil, hingga saat ini jalan di tempat bahkan pada beberapa indikator menunjukkan penurunan.

Sebenarnya, kinerja ekonomi nasional memang membaik, tetapi negara lain maju dengan lebih cepat. WTO mencatat pada 2003 pertumbuhan ekspor Indonesia naik 7% dari tahun sebelumnya. Namun, pada tahun yang sama China mampu mencatat pertumbuhan

²⁹Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi UI, *Studi Kasus Manajemen KUD Setia Kawan*, LPM-UI, Jakarta, 1990, hal. 121

³⁰Anne Booth, "Pembangunan: Keberhasilan dan Kekurangan," dalam, Donald K. Emmerson, *Indonesia Beyond Soeharto*, Gramedia&TAF, Jakarta, 2001, hal. 201

ekspor 34% dari tahun sebelumnya. Pada 2003 nilai ekspor Indonesia pada 2003 tercatat US\$61 miliar, sementara Thailand mencapai US\$80,5 miliar, padahal potensi ekonomi Indonesia jauh lebih besar daripada Thailand, dan penduduk Indonesia hampir tiga kali Thailand.

Sebagai negara yang sedang menghadapi masalah pengangguran yang tinggi dan rendahnya daya saing di tingkat regional dan internasional, Indonesia memerlukan terobosan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi domestiknya.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kegiatan usaha masyarakat. Jumlah wirausahawan baru perlu dilipatgandakan. Rasio penduduk Indonesia yang terjun menjadi pengusaha masih kecil, padahal potensi pasar dan sumber daya alamnya besar. Dalam konteks itu, patut didukung program pemerintah untuk mencetak enam juta usahawan baru yang diluncurkan tahun lalu.

Makin banyak yang bersedia menjadi usahawan, terutama dari kalangan yang terdidik, akan makin baik bagi bangsa kita ke depan. Kalau warga negara kita sendiri tidak berminat untuk menjadi pengusaha, akan banyak peluang usaha yang akan dimanfaatkan bangsa lain yang lebih tekun dan ulet.

Peranan dunia usaha dalam memajukan bangsa amatlah besar. Seorang tokoh bisnis senior Indonesia, Sukamdani Sahid Gitosardjono menyatakan bahwa di hampir semua negara, peranan utama dunia usaha adalah menciptakan kesempatan kerja dan mengkonversi aset yang menganggur melalui proses kreativitas dan inovasi, menjadi aset yang memiliki makna dan nilai tambah bagi kehidupan dan penghidupan manusia berupa national wealth yang bersifat fisik dan nonfisik. Selain itu, dunia usaha juga berperan dalam menyumbangkan penerimaan negara dalam bentuk pajak, bea, cukai, dan devisa .

Peranan badan usaha bisnis nasional diharapkan terus meningkat dan mampu menjadi motor bagi kebangkitan ekonomi nasional. Tidak ada negara yang ekonominya maju dan rakyatnya sejahtera tanpa memiliki dunia usaha yang tangguh.

Sesungguhnya, tidak banyak negara yang memiliki sekaligus dua modal penting dalam menggerakkan ekonomi, yaitu besarnya pasar domestik dan melimpahnya sumberdaya alam. Pada 2000, penduduk Indonesia sekitar 210 juta, jumlahnya lima kali lebih besar dibandingkan jumlah penduduk Indonesia pada 1900 yang hanya 40 juta jiwa. Pada 2035 jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 400 juta jiwa, bertambah 200 juta, dalam waktu 35 tahun.

Pertambahan penduduk sebanyak itu merupakan pasar yang amat besar, yang memerlukan jutaan rumah, ribuan kilometer jalan, jutaan

m3 air bersih, dan kebutuhan sehari-hari, baik sandang, pangan, maupun rekreasi.

Bandingkan dengan pasar domestik Malaysia yang hanya 25 juta orang dan pasar domestik Jerman yang hanya 80 juta orang. Di era globalisasi ini, pasar yang amat besar yang kita miliki itu, juga diincar oleh pelaku usaha dari luar negeri. Indonesia perlu mengantisipasi lonjakan permintaan akan aneka barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan domestik yang demikian besar itu agar dapat dipenuhi oleh kemampuan ekonomi nasionalnya.

- **Membangun Industrialisasi Terarah**

Untuk memenuhi kebutuhan seiring meningkatnya permintaan akibat meningkatnya jumlah penduduk dan aspirasi untuk mengelola sendiri berbagai kekayaan alam yang ada, diperlukan program industrialisasi yang terarah, di samping kondisi sosial politik yang kondusif untuk menumbuhkan iklim investasi yang sehat. Dalam hal ini, pemerintah perlu memberikan insentif yang menarik masyarakat dan dunia usaha untuk ikut meningkatkan kegiatan ekonomi melalui industrialisasi itu.

Tak diragukan lagi bahwa Indonesia adalah negara yang kaya sumber daya alam. Namun untuk dapat setara dengan negara maju kita memerlukan spirit, inovasi, kemauan dan kerja keras serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keterampilan manajemen. Perkembangan teknologi yang amat pesat saat ini, serta peningkatan kualitas lembaga pendidikan, patut diwaspadai dalam konteks pembangunan SDM negara kita, yang merupakan modal penting bagi kemajuan negara.

Institusi pendidikan kita tertinggal dari universitas di luar negeri. National University of Singapore (NUS) misalnya, menduduki peringkat 18 dunia, sementara tidak satu pun lembaga pendidikan tinggi Indonesia yang masuk dalam peringkat 100 besar. Dalam banyak hal, kita memang menjadi tertinggal karena terlambat melakukan perubahan dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia yang amat dinamis itu.

Dunia berubah, kita juga perlu menyesuaikan diri. Demikian prinsip dasarnya, baik pada skala perseorangan, perusahaan maupun negara. Perekonomian China sejak 10 tahun terakhir tumbuh pesat dengan meyakinkan, tidak bisa dilepaskan oleh perubahan visi sejak kepemimpinan Deng Xiao Ping, Jiang Zemin, dan Hu Jin Tao. Lahir banyak sekali pengusaha baru di negara itu yang didorong oleh perubahan keadaan.

Kita memang perlu mempersiapkan diri dan melengkapi diri kita. Mahatma Gandhi mengatakan "Kita harus mengubah diri kita sendiri

sebelum kita berharap dapat melihat dunia yang berubah". Semakin banyak yang bisa kita pahami tentang cara dunia berubah ke depan ini, semakin besar pula kesempatan yang kita miliki untuk memastikan kejayaan masa depan negara dan bangsa kita.

Dalam konteks pembangunan ekonomi di era globalisasi yang sangat dinamis ini, peranan pemerintah suatu negara menjadi semakin terbatas. Hal ini terjadi bukan semata-mata disebabkan oleh gencarnya proses liberalisasi dan kapitalisme, tetapi juga oleh kenyataan bahwa aspek kehidupan masyarakat modern menjadi semakin kompleks. Negara semakin kurang mampu menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh warga negaranya. Untuk mengelola dan memajukan ekonomi suatu masyarakat dalam lingkup negara, diperlukan hadirnya anggota masyarakat yang mampu melihat peluang yang bernilai ekonomis dan mengelolanya menjadi suatu kegiatan yang memberi keuntungan pada semua pihak.³¹

Tak berlebihan mengatakan bahwa masa depan kesejahteraan rakyat Indonesia amat ditentukan oleh kiprah para pengusaha Indonesia. Semua negara yang maju, makmur dan sejahtera memiliki banyak pengusahanya yang tangguh.[]

³¹Siswono Yudo Husodo, *Kewirausahaan & Upaya Memakmurkan Bangsa*, Bisnis Indonesia, 6 Juni 2006, hal. 4